

ANALISIS PERAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) KABUPATEN BENGKALIS

Nazrantika Sunarto¹, Dwi Astuti², Enjeli³, Rita Maisyarah⁴

Politeknik Negeri Bengkalis

rantipolbeng@gmail.com¹, dwi@polbeng.ac.id², enjeli063@gmail.com³, rita.maisyarah93@gmail.com⁴

Abstract

TPID is the Government's vanguard in controlling national inflation, tasked with monitoring and preparing strategic steps. TPID Bengkalis Regency was only formed in 2020 with the Decree of the Regent of Bengkalis Number 151/KPTS/III/2017 and was last amended by the Decree of the Regent of Bengkalis Number 183/KPTS/I/2022. This study aims to determine and explain the role of TPID Bengkalis Regency in controlling regional inflation. This study uses a research method with a qualitative descriptive approach. The results of this study are the active role carried out by TPID Bengkalis Regency is a cheap market activity organized by the Trade and Industry Service, which has been initiated by Bengkalis Regency since 2019, Provision of Substitute Food Products, Market and Distributor Inspections and Monitoring the Bapokting application. While the role of participation includes providing guidance to millennial farmers in Pambang Village, Bengkalis Regency to increase production results and attending High Level Meetings (HLM). Furthermore, passive roles include planting movements, the use of BTT assistance funds has not been implemented, inter-regional cooperation has not been carried out, and transportation assistance has not been carried out.

Keywords : Role, TPID, Control, Inflation, Bengkalis Regency

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang di kawasan Asia. Salah satu indikator kemajuan suatu Negara adalah perekonomian. Perekonomian menjadi salah satu pondasi utama kekuatan suatu Negara. Namun, stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan dengan mulus karena perekonomian dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Salah satu indikator utama yang digunakan untuk melihat perkembangan perekonomian suatu Negara adalah tingkat laju inflasi. Inflasi dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang memiliki penghasilan tetap. Hal ini disebabkan karena harga barang di pasar akan naik, sedangkan penghasilan masyarakat tidak berubah.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pengendalian inflasi merupakan satu keharusan. Untuk itu pemerintah telah membentuk tim yang bertugas memantau inflasi secara terus menerus, untuk memastikan kebijakan pengendalian inflasi bisa dilakukan secara aktual, tepat dan akurat. TPID merupakan garda terdepan Pemerintah dalam hal pengendalian inflasi Nasional. Tim lintas sektor yang beranggotakan semua elemen terkait, secara bersama mengoptimalkan peran dan fungsinya guna merumuskan kebijakan implementatif dan efektif dalam pengendalian inflasi tepat waktu dan tepat

sasaran. TPID merupakan tim yang bertugas memantau dan menyiapkan langkah-langkah strategis dan konkrit untuk mengatasi permasalahan inflasi khususnya di daerah, sesuai dengan kondisi yang dialami pada daerah masing-masing. TPI Nasional dibentuk sejak tahun 2005 berdasarkan SKB Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.02/2005 dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 7/9/KEP.GBI/2005. Pada tanggal 2 April 2013 Kementrian Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah sebagai pedoman bagi daerah dalam pelaksanaan koordinasi TPID dalam menjaga stabilitas harga, serta untuk penyeragaman struktur organisasi/ kelembagaan TPID. Tim Pengendalian Inflasi Daerah merupakan Tim *mandatory* program nasional yang dibentuk bertujuan menjaga perkembangan inflasi yang rendah dan stabil. Dalam menjalankan peran pengendalian inflasi, kinerja TPID pada masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di tiap Provinsi akan diukur dan dinilai melalui Evaluasi Kinerja TPID, untuk meraih predikat TPID terbaik dalam ajang TPID *award*. Hal ini dilakukan agar TPID bekerja optimal dan saling berkoordinasi dan mengisi agar inflasi daerah dan Nasional tetap dalam keadaan terkendali. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang rendah dan stabil akan berdampak positif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan terjaganya daya beli. Inflasi yang rendah dan stabil juga kondusif bagi para pelaku ekonomi untuk mengambil keputusan dalam melakukan kegiatan ekonomi, dengan demikian berdampak positif kepada pertumbuhan ekonomi nasional.

TPID Kabupaten Bengkalis baru dibentuk sejak tahun 2020 dengan Surat Keputusan Bupati Bengkalis dengan Nomor 151/KPTS/III/2017 dan terakhir diubah dengan Surat Keputusan Bupati Bengkalis dengan Nomor 183/KPTS/I/2022. Menyadari pentingnya data dan informasi dalam merumuskan kebijakan inflasi, maka dari itu Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bengkalis sebagai sekretariat TPID Kabupaten Bengkalis telah menghimpun data perkembangan inflasi, kebijakan dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2022. Upaya pengendalian inflasi harus dilakukan secara berkesinambungan, hal ini karena inflasi sangat liquid dan mobil (terus bergerak) fluktuatif khususnya di Kabupaten Bengkalis. Sebagai daerah yang relatif bukan sebagai produsen bahan pokok terutama bahan makanan seperti beras, cabe dan sejenisnya. Kabupaten Bengkalis sangat rentan akan tekanan inflasi jika tidak dikoordinasikan dan dikendalikan dengan baik. Luasnya wilayah pemerintahan dan kondisi geografis kepulauan dengan karakter wilayah yang berbeda-beda, menjadi tantangan tersendiri Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam usaha pengendalian inflasi.

Pada tahun 2023, bekerja sama dengan BPS Pemerintah Kabupaten Bengkalis, telah mulai menyusun Diagram Timbang sebagai dasar penghitungan Inflasi Indeks Harga Konsumen pada tahun 2024. Hingga saat ini Indeks inflasi yang dijadikan acuan dalam merefleksikan kondisi inflasi IHK Kabupaten Bengkalis masih mengacu pada Indeks inflasi IHK Kota Dumai, sebagai kota terdekat dari 90 Kabupaten/kota yang telah ditetapkan pemerintah sebagai lokus pencatatan inflasi yang dilakukan oleh BPS. Meski tidak sebagai ditetapkan sebagai daerah pencatatan IHK, namun secara aktif Kabupaten

Bengkalis terus mengikuti program pengendalian inflasi dan merumuskan berbagai program kegiatan yang berorientasi kesejahteraan masyarakat.

Pasca di bentuknya TPID tahun 2020 Kabupaten Bengkalis secara aktif mengikuti kebijakan program dan kegiatan pengendalian inflasi yang dirumuskan pemerintah. Bahkan sebelum dibentuknya TPID, Kabupaten Bengkalis juga telah menjalankan banyak program yang berorientasi pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Bengkalis melaksanakan HLM (*High Level Meeting*) TPID sebanyak dua kali. Rapat yang keduanya dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2023 dengan Tema “Implementasi Pengendalian Inflasi dengan Rencana Aksi Roadmap 2023-2024 melalui Strategi 4K, yaitu Strategi keterjangkauan harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif. Sedangkan rapat kedua dilaksanakan bersamaan dengan persiapan natal dan tahun baru, pada tanggal 12 Desember 2023 dengan Tema Persiapan HBKN 2023.

Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu saat ini perlu adanya peran dan peningkatan kinerja Tim pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bengkalis dalam hal mengenai pengendalian inflasi. Kerjasama dan komitmen antar seluruh pelaku ekonomi baik dari pihak pemerintah maupun swasta yang seharusnya untuk mencapai tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Terjadinya inflasi di Kabupaten Bengkalis tidak terlepas dari penemuan di lapangan yang terjadi, yaitu gejolak harga bahan makanan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu, diantaranya penelitian Yurianto (2020) dengan judul “Analisis Kebijakan Pengendalian Inflasi DKI Jakarta”. Hasil penelitian menggunakan Kebijakan pengendalian inflasi oleh TPID Jakarta yang salah satunya dengan strategi 4 K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi telah memberikan hasil yang sangat baik dan kondusif bagi perekonomian Jakarta. Hal ini ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi Jakarta tahun 2018 pada tingkat yang masih dapat diterima baik oleh dunia usaha, perantara, distributor maupun konsumen. Pelaksanaan Pasar Murah dan Operasi Pasar secara periodik terbukti efektif dalam pengendalian inflasi untuk itu perlu terus digalakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanaton (2023) dengan judul penelitian “Analisis Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Banda Aceh dalam Pengendalian”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran TPID Kota Banda Aceh menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu peran aktif yang dimana TPID melakukan optimalisasi pasar murah/ operasi pasar, melakukan penguatan dan pengawasan cadangan pangan, melakukan integrasi *update* data harga pangan di habapangan.go.id, dan peningkatan kehandalan TPID melalui Program Pembinaan (*Capacity Building*). Peran partisipatif, melakukan kerjasama dengan daerah surplus pangan dan pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional. Peran pasif, peran yang dilakukan oleh Bappeda sebagai anggota TPID akan tetapi tidak menjalankan fungsinya

dengan baik serta memberikan fungsinya kepada anggota pengurus lainnya. Strategi yang dilakukan oleh TPID Kota Banda Aceh yaitu strategi 4K berupa keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Peranan TPID telah sesuai dengan pedoman pengendalian secara aktif, partisipatif, pasif. Diharapkan adanya upaya dari semua anggota TPID agar kinerjanya dalam pengendalian inflasi di kota Banda Aceh menjadi lebih maksimal.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mahmud, (2018) dengan judul penelitian Analisis Peranan Tim Pengendalian Daerah terhadap Perekonomian Dumai. Hasil penelitian Hasil dari penelitian ini adalah peran tim pengendalian inflasi daerah adalah mengevaluasi sumber-sumber dan potensi tekanan inflasi serta dampaknya terhadap pencapaian target inflasi, dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditempuh dalam rangka pengendalian inflasi sehingga dapat meningkatkan daya beli dan menghambat laju pertumbuhan penduduk miskin di Kota Dumai.

B. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. (bi.go.id)

Dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses meningkatkan harga-harga secara umum dan terus menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Berikut ini pengertian inflasi menurut para ahli: Menurut Waluyo, Inflasi merupakan salah satu bentuk penyakit-penyakit ekonomi yang sering terjadi dan hampir di semua negara. Kecenderungan dari kenaikan harga-harga pada umumnya dan terjadi secara terus menerus. Menurut Marcus, Inflasi merupakan sebuah nilai pada saat tingkat dari suatu harga barang ataupun jasa umumnya yang sedang mengalami kenaikan. (Gramedia.com)

C. Kebijakan PMK 134/PMK.07/2022

Bersamaan dengan kenaikan BBM pada bulan Agustus 2022, Pemerintah telah merumuskan kebijakan mitigasi gejolak inflasi yang akan berdampak luas dan berpotensi mengancam stabilitas dan kondusifitas nasional. Dalam rangka menunjang gerakan masiv kendali inflasi tahun 2022 telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 134/pmk.07/2022. Tentang. Belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi.

Berdasarkan PMK tersebut terdapat rumusan enam langkah konkrit yang harus dilakukan dalam proses pengendalian inflasi di daerah meliputi:

1. Operasi Pasar Murah

Dengan cara subsidi atau dengan pola subsidi angkutan, sehingga harga konsumen adalah harga dasar dari petani.

2. Sidak Pasar/Distributor

Dalam rangka memastikan tidak ada permainan harga dan penimbunan pasokan penyebab dari kelangkaan barang.

3. Gerakan Menanam

- Menanam komoditas pembentuk inflasi untuk keperluan rumah tangga.
4. Kerjasama antar Daerah
Melakukan Kerjasama dengan daerah penghasil kebutuhan untuk stabilitas pasokan.
 5. Penggunaan BTT
Penggunaan dana BTT untuk menunjang kegiatan pengendalian inflasi daerah.
 6. Dukungan Transportasi
Memberikan bantuan subsidi transportasi dan atau bantuan langsung penyedia jasa transportasi.

D. Peran

Menurut Soejono, (2012) menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

Adapun Jenis-Jenis peran menurut Soekanto, (2012) yaitu: 1. Peran Aktif merupakan sebuah peran yang dilakukan sebuah orang secara obsolut atau selalu aktif dalam sebuah tindakannya yang mereka lakukan di dalam organisasi atau sebuah lembaga sosial yang mereka miliki. Keaktifan ini sendiri dapat diukur dengan melalui bentuk kehadiran; 2. Peran Partisipatif yaitu sebuah peran yang dilakukan hanya berdasar pada jangka waktu tertentu. Definisi inisangat berlawanan sekali dengan peran aktif, karena biasanya kondisi peran partisipatif dapat dilakukan dengan wacana objek bukan sebuah subjek; 3. Peran Pasif yaitu peran yang tidak dilakukan dan mengindikasikan bahwa peran yang digunakan sebagai sebuah simbol terhadap keadaan tertentu ada di dalam suatu kehidupan masyarakat.

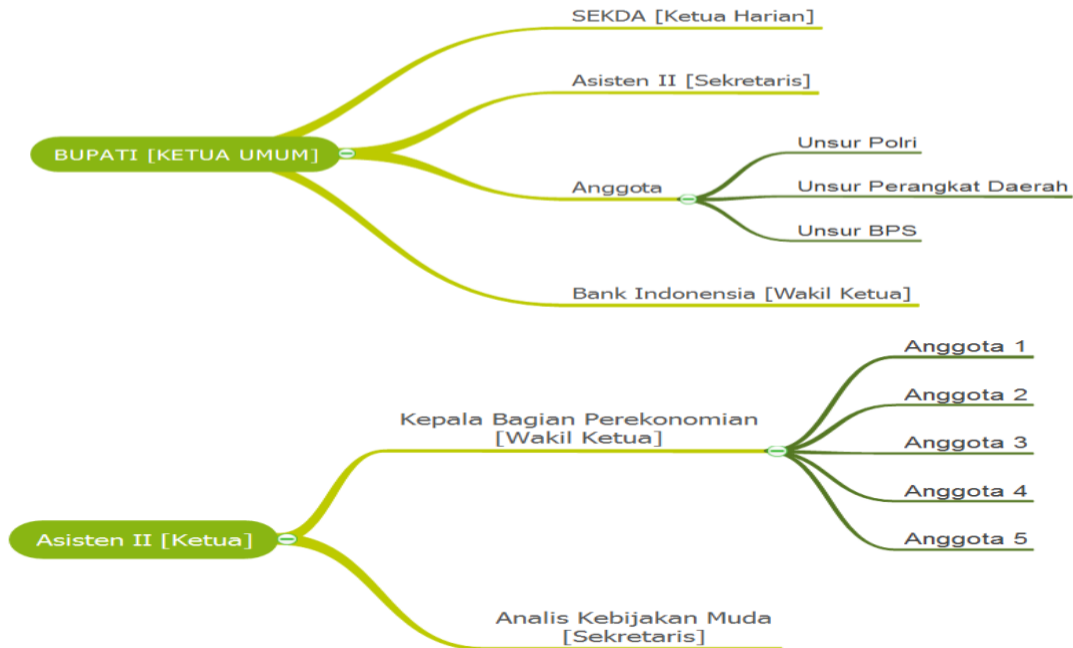
3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan informasi dari informan maupun kata-kata tertulis yang diamati, sehingga mengetahui maksud dari penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini bersumber dari observasi dan wawancara. Adapun hasil penelitian ini didapatkan dengan cara observasi ke Kantor Bupati Kabupaten Bengkalis dan melakukan wawancara ke beberapa informan yaitu Kabag perekonomian selaku sekretariat TPID Kabupaten Bengkalis.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tugas dan Fungsi TPID Kabupaten Bengkalis

TPID Kabupaten Bengkalis dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 185/KPTS/4/2020 dan terakhir diubah dengan Surat Keputusan Bupati Bengkalis dengan Nomor 183/KPTS/I/2022. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut TPID Kabupaten Bengkalis secara struktur terbagi menjadi 2, yaitu: 1) Tim Teknis yang berisikan Perangkat Daerah dan stekholder terkait, 2) Tim Sekreariat (Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah):



Gambar 2. Struktur TIM Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bengkalis

Sumber : Sekretariat TPID Bengkalis, 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 183/KPTS/I/2022 tentang Pembentukan TPID tugas dan fungsi TPID adalah sebagai berikut:

1. Melakukan PULDATIM perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten
2. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten, memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan provinsi.
3. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten
4. Melakukan koordinasi dengan TPIN dan TPIP.
5. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten.

Meski tidak sebagai ditetapkan sebagai daerah pencatatan IHK, namun secara aktif Kabupaten Bengkalis terus mengikuti program pengendalian inflasi dan merumuskan berbagai program kegiatan yang berorientasi kesejahteraan masyarakat Pasca di bentuknya TPID tahun 2020 Kabupaten Bengkalis secara aktif mengikuti kebijakan program dan kegiatan pengendalian inflasi yang dirumuskan pemerintah. Bahkan sebelum dibentuknya TPID, Kabupaten Bengkalis juga telah menjalankan banyak program yang berorientasi pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa kebijakan program yang telah dilakukan Kabupaten Bengkalis dalam mengendalikan inflasi sejak adanya TPID:

1. Membentuk TPID Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 dan membentuk satgas pangan pada tahun 2022.
2. Secara aktif mengikuti rapat koordinasi baik kordinasi lintas sektor maupun *High Level Meeting* tingkat Kabupaten maupun provinsi bahkan pusat.

3. Menyusun peta jalan pengendalian inflasi pada tahun 2021 sesuai arahan presiden pada rakornas tahun 2021. Peta jalan disusun dengan strategi 4 K.
4. Mengimplementasi Peta Jalan melibatkan berbagai Perangkat Daerah dan *stakeholder* agar inflasi dan daya beli dipastikan kondusif.
5. Melalui kebijakan 1 milyar satu desa, kelurahan dan kecamatan pemerataan distribusi perekonomian menjadi lebih baik guna menekan disparitas pembangunan.
6. Penyaluran dana bermasa dan program bantuan subsidi sembako kepada masyarakat berkemampuan rendah (miskin) guna meningkatkan kemampuan ekonomi dan sekaligus menjaga stabilitas daya beli agar perekonomian tetap kondusif.
7. Pada tahun 2023, sejalan dengan kebijakan nasional untuk mengantisipasi gejolak ekonomi global, Kabupaten Bengkalis ikut mengupayakan dan mensukseskan seluruh arahan program pemerintah terkait pengendalian inflasi.

B. Pembahasan

Hasil penelitian guna memberikan serta memaparkan jawaban terkait permasalahan yang diteliti mengenai peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bengkalis dalam Pengendalian Inflasi. Bentuk keseriusan TPID dalam menyikapi perkembangan inflasi nasional, selain dari mengikuti secara terus menerus perkembangan inflasi melalui Rakorpusda, Kabupaten Bengkalis melalui TPID juga telah melakukan beberapa langkah kebijakan pengendalian inflasi sebagai berikut:

1. Peran Aktif merupakan sebuah peran yang dilakukan sebuah orang secara obsolut atau selalu aktif dalam sebuah tindakannya yang mereka lakukan di dalam organisasi atau sebuah lembaga sosial yang mereka miliki. Peran aktif yang di definisikan bahwa TPID aktif melakukan kegiatan untuk mengendalikan inflasi daerah Kabupaten Bengkalis. Berikut ini beberapa program yang aktif dilakukan pemantauan oleh TPID Kabupaten Bengkalis:
 - a. Kegiatan pasar murah yang diselenggarakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, sudah digagas kabupaten Bengkalis sejak tahun 2019, bahkan sebelum mendapat arahan dari Pemerintah pusat untuk dilakukan secara masif di setiap Daerah dalam rangka stabilitas harga. Pasar murah ini berupa bantuan subsidi pemerintah terhadap beberapa jenis barang kebutuhan pokok masyarakat disalurkan dalam bentuk paket sembako. Pelaksanaannya dilakukan menjelang hari besar kagamaan seperti puasa, hari raya Idul Fitri, hari raya Natal dan tahun baru Imlek. Pada tahun 2023 telah tersalurkan 200 ribu paket sembako ditujukan kepada masyarakat ekonomi lemah. Program ini bertujuan menstimulus daya beli masyarakat dan sekaligus langkah pengendalian inflasi, dalam jangka pendek.
 - b. Penyediaan Produk Pangan Substitusi
Merupakan salah satu program dalam rangka mengelola permintaan untuk menjaga keseimbangan antara *supply and demand*. Program lintas sektor yang melibatkan kolaborasi antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perikanan dan Dinas PMD, Kecamatan (TPPKK) berupa menyediakan bahan pangan bersiko inflasi tinggi seperti cabe, bawang dan sejenisnya yang dijadikan dalam bentuk kemasan yang bisa salurkan sebagai alternatif atau penyeimbang harga pada saat terjadi keterbatasan pasokan.

- c. Sidak Pasar dan Distributor dilaksanakan bersama satgas pangan, bulog dan Perangkat Daerah terkait.
 - d. Pemantauan Aplikasi Bapokting
Monitoring evaluasi harga Bapokting Pemerintah Kabupaten Bengkalis memiliki sistim pemantauan harga Bapokting berbasis IT (aplikasi android) yang dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Aplikasi Bapokting Kabupaten Bengkalis secara realtime memberikan info perkembangan harga bapokting *up to date* setiap hari. Pergerakan harga di lapangan sangat fluktuatif dan variatif, aplikasi Bapokting memberikan info harga rata-rata di lapangan setiap Kecamatan, sehingga dapat dijadikan referensi bagi masyarakat dalam berbelanja. Bapokting sengaja di desain hanya fokus memantau harga barang-barang kebutuhan pokok dan penting. Karena pada prinsipnya inflasi terjadi disebabkan kenaikan pada barang-barang yang secara umum dibutuhkan masyarakat (bahan pokok).
2. Peran Partisipatif merupakan sebuah peran yang dilakukan hanya berdasar pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, peran partisipatif yang dilakukan oleh TPID Kabupaten Bengkalis, sebagai berikut: a). Melakukan pembinaan kepada para petani lokal daerah, contoh petani millennial di Desa Pambang Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan hasil produksi mereka. Hal ini bekerjasama dengan Bank Indonesia dengan melakukan pembinaan beberapa kali dengan dengan cara *Digital Farming*, kemudian berharap mereka bisa secara mandiri meningkatkan produksinya, sehingga petani tersebut dapat mensuplai/menyediakan hasil produksinya sendiri; b). Mengikuti rapat *High Level Meeting* (HLM) merupakan rapat tertinggi bagi pemangku kebijakan untuk saling berkoordinasi menetapkan kebijakan pengendalian inflasi. Kehadiran dalam mengikuti HLM merupakan salah satu bentuk komitmen yang nyata. Karena itu tingkat kehadiran dan rumusan kebijakan yang dihasilkan dari HLM menjadi salah satu kriteria penilaian oleh pemerintah pusat, untuk menjadi nominasi pemenang TPID Award. Dalam hali ini, Tingkat kehadiran TPID dalam HLM sudah sangat baik dengan capaian hampir 100%. Namun demikian kehadiran kepala dinas secara langsung mengikuti HLM masih kurang dari 50 peserta.
 3. Peran Pasif merupakan peran yang tidak dilakukan dan mengindikasikan bahwa peran yang digunakan sebagai sebuah simbol terhadap keadaan tertentu ada di dalam suatu kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, peran pasif TPID Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:
 - a. Gerakan menanam pada dasarnya telah terlaksana di lapangan secara mandiri, hanya belum dilaksanakan secara terpola oleh pemerintah.
 - b. Penggunaan dana BTT belum dilaksanakan karena dirasakan belum *urgent*, saat ini pasar melakukan mekanismenya sendiri terkait biaya transportasi dan sejauh ini dalam pemantauan masih berjalan baik.
 - c. Kerjasama antar daerah belum dilakukan karena sejauh ini pasokan barang dan daya beli masyarakat masih cukup terkendali.
 - d. Bantuan transportasi belum dilakukan karena bengkalis tidak memiliki moda transportasi umum yang resmi seperti di kota besar pada umumnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Laju Inflasi yang terkendali menjadi salah satu indikator bahwa ekonomi Indonesia masih kuat di tengah situasi global yang menantang. Tahun 2023 tingkat inflasi jauh lebih terkendali dibanding 2022. Persoalan resesi global dan kerawanan pangan akibat cuaca ekstrim menjadi isu utama di setiap negara, sehingga perlu diantisipasi agar inflasi tetap terkendali agar masyarakat dan aktifitas ekonomi berjalan kondusif.

1. Secara umum kinerja TPID Kabupaten Bengkalis sebagai organisasi lintas sektor masih terdapat kelemahan dalam hal: 1) koordinasi, 2) konsistensi dan 3) komitmen perangkat daerah dalam mengikuti rakor, sehingga program/kegiatan yang dirumuskan untuk pengendalian inflasi masih belum komprehensif. Namun demikian kinerja tahun 2023 lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
2. Peran aktif yang dilakukan TPID Kabupaten Bengkalis adalah Kegiatan pasar murah yang diselenggarakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, sudah digagas kabupaten Bengkalis sejak tahun 2019, Penyediaan Produk Pangan Substitusi, Sidak Pasar dan Distributor dilaksanakan bersama satgas pangan, bulog dan Perangkat Daerah terkait, dan Pemantauan aplikasi Bapokting. Sedangkan peran partisipasi meliputi Melakukan pembinaan kepada para petani lokal daerah, contoh petani millennial di Desa Pambang Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan hasil produksi dan Mengikuti rapat *High Level Meeting* (HLM) merupakan rapat tertinggi bagi pemangku kebijakan untuk saling berkoordinasi menetapkan kebijakan pengendalian inflasi. Selanjutnya peran pasif meliputi Gerakan menanam, penggunaan dana bantuan BTT belum dilaksanakan, Kerjasama antar daerah belum dilakukan, bantuan transportasi belum dilakukan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Bi.go.id, Pengertian Inflasi, diakses tanggal 1 Oktober 2024, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/inflasi/default.aspx>.
- Mahmud, Soni Fajar, 2018, Analisis Peranan Tim Pengendalian Inflasi Daerah terhadap Perekonomian Kota Dumai, UNITEX Vol 11 No.1 Januari - Juni 2018 p-ISSN 2089-3957 e-ISSN 2580-2585.
- Nurhasanaton, 2023, *Analisis Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Banda Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Banda Aceh: <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/24353>.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/pmk.07/2022 Tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi.
- Rosyda, Pengertian Inflasi, diakses pada tanggal 2 Oktober 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/inflasi/>.
- Soekanto, Soerjono, 2012, Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yurianto, 2020, *Analisis Kebijakan Pengendalian Inflasi DKI Jakarta*. BALANCE: Economic, Business, Management, and Accounting Journal <https://doi.org/10.30651/blc.v17i1.4179>.